



TEKNOLOGI PEMERINTAHAN

POLITIK PEMERINTAHAN

Nabil Satya Pramana (2450111036)

Teori Pemerintahan

Pendahuluan

Teknologi informasi berkembang pesat dan menjadi kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya cepat dan transparan, tapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang makin digital.





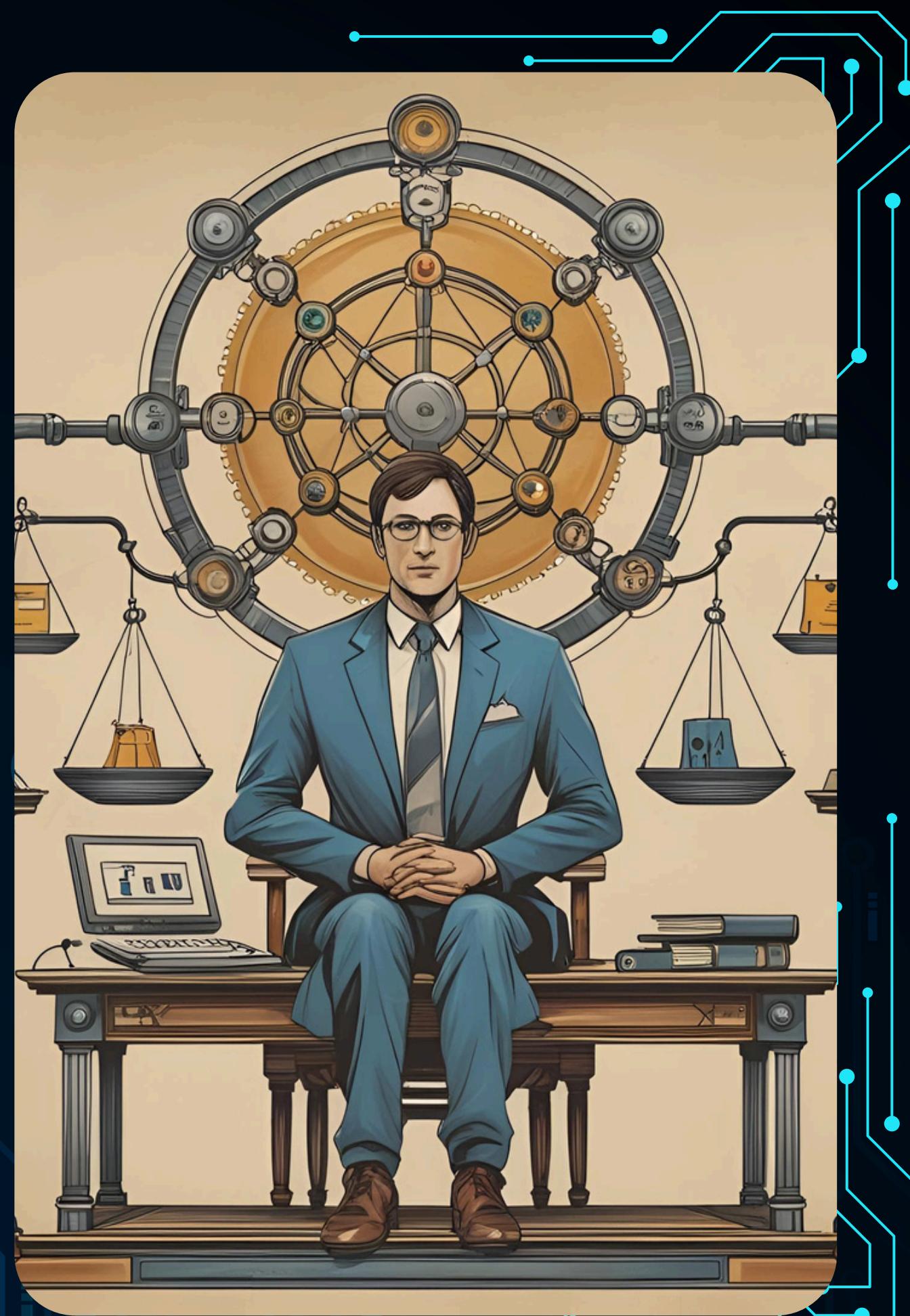
Apa itu Teknologi Pemerintahan?

E-Government adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, pelayanan publik, dan transparansi pemerintahan.

POLITIK PEMERINTAHAN (ARAH & KEPUTUSAN)

Politik pemerintahan adalah proses pengambilan keputusan publik, distribusi kekuasaan, dan arah kebijakan.

Teknologi memerlukan landasan politik yang kuat agar dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.





Teknologi dan Politik, Siapa Mengontrol Siapa?

Teknologi bukan entitas netral. Siapa yang memegang kendali terhadap sistem, data, dan keputusan digital, bisa mengarahkan distribusi kekuasaan.

Tujuan Pengembangan E-Government

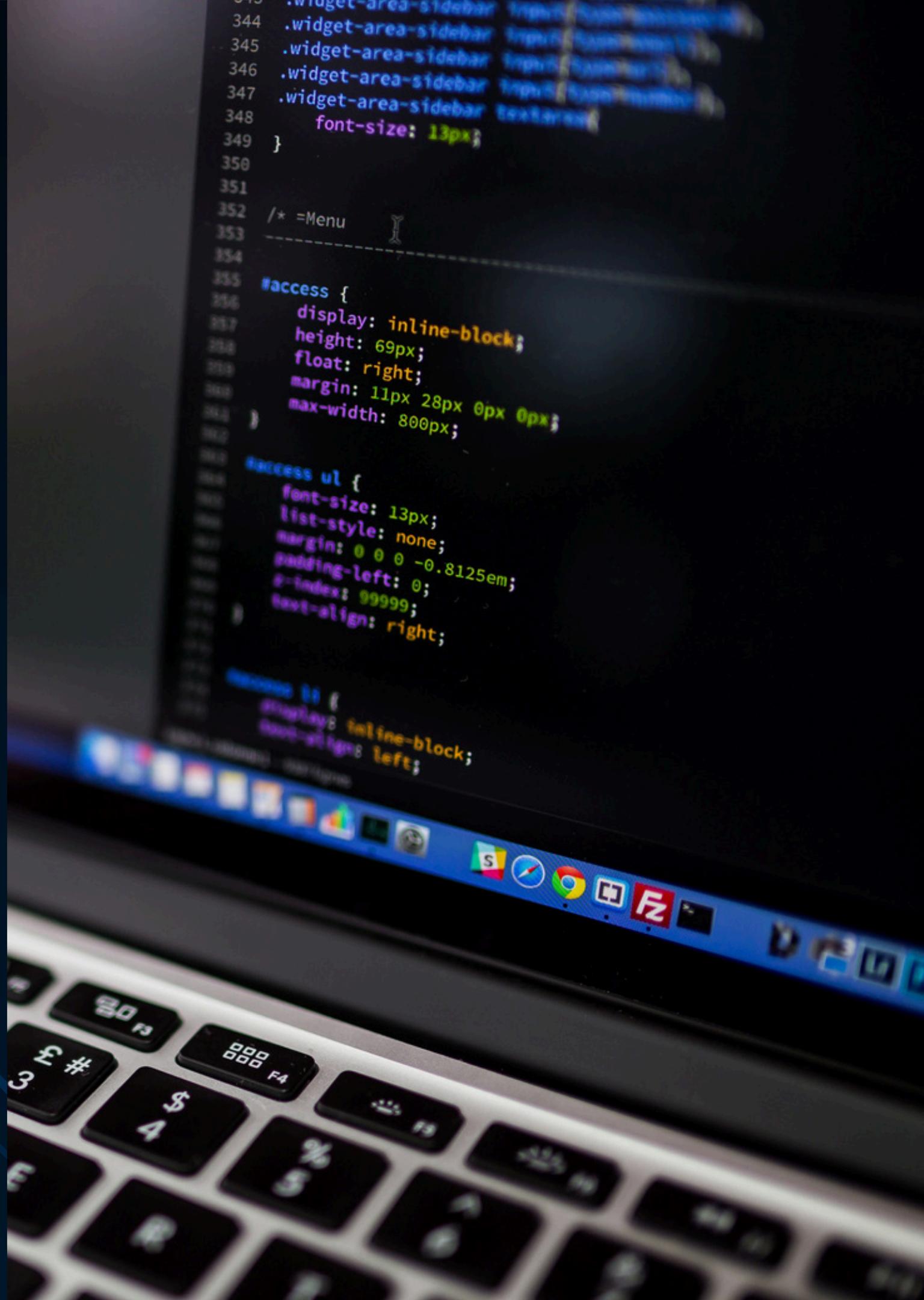


Meningkatkan efisiensi pelayanan

Mendorong transparansi dan akuntabilitas

Membangun keterlibatan publik

Menyederhanakan koordinasi antar lembaga





Kendala Implementasi di Indonesia

- 1 **SDM Belum Siap Digitalisasi**
- 2 **Infrastruktur Yang Belum Merata**
- 3 **Kurangnya Sinergi Antar Lembaga**
- 4 **Minimnya Partisipasi Masyarakat**

Transformasi Birokrasi Digital

Birokrasi dituntut menjadi organisasi adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Struktur lama yang kaku harus ditinggalkan demi respons yang lebih cepat terhadap perubahan.s





Penutup

Teknologi tanpa arah politik hanyalah alat. Politik tanpa teknologi akan tertinggal. Keduanya harus saling mendukung untuk membentuk pemerintahan yang maju, adil, dan responsif. Digitalisasi pemerintahan bukan sekadar canggih, tapi juga harus demokratis dan berpihak pada publik.

TERIMA KASIH